

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur, seperti dijelaskan berikut :

2.1 Landasan Kebijakan

2.1.1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan berbagai pengertian diantaranya adalah wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, sebagai berikut:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melaksanakan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Selain itu juga diutarakan tentang daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha pariwisata, industri pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata sebagai berikut:

- 1) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- 2) Daerah tujuan pariwisata disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 3) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 4) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 5) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 6) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selain kegiatan perjalanan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Di dalam pariwisata terdapat daya tarik wisata yang mengandung arti yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan adanya kepariwisataan bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Menghapus kemiskinan
- d) Mengatasi pengangguran
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f) Memajukan kebudayaan
- g) Mengangkat citra bangsa
- h) Memupuk rasa cinta tanah air
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j) Mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga memamparkan pembangunan kepariwisataan berdasarkan asas sebagaimana, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 Relevasinya Terhadap Kecamatan Lembang

Pada pasal 39 berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 menjelaskan bahwa kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- 1) Gunung Tangkubanparahu di Kecamatan Lembang
- 2) Bumi perkemahan Cikole di Kecamatan Lembang
- 3) Penangkaran Buaya Cikole di Kecamatan Lembang
- 4) Jayagiri (Lintas Hutan) di Kecamatan Lembang
- 5) Situ Lembang di Kecamatan Parongpong
- 6) Maribaya di Kecamatan Lembang
- 7) Wisata ilmiah observatorium Boscha di Kecamatan Lembang
- 8) Curug Omas di Kecamatan Lembang

- 9) Yunghun di Kecamatan Lembang
- 10) Taman Bunga Cihideung di Kecamatan Parongpong
- 11) Taman Wisata Berkuda di Kecamatan Parongpong
- 12) Curug Cimahi di Kecamatan Cisarua
- 13) Curug Panganten di Kecamatan Cisarua.

2.2 Teori Pariwisata

2.2.1 Definisi Pariwisata

Secara etimologis pariwisata terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan (traveling), kata wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan (travelers), dan kepariwisataan yaitu hal, kegiatan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Sifat kegiatan pariwisata adalah sosial, ekonomi, kebudayaan yang timbul sebagai afek dari perjalanan wisata. Sedangkan aspek yang berhubungan dengan pariwisata adalah manusia, tempat/ruang, dan waktu. Disini manusia adalah orang atau sekelompok orang berperan sebagai yang melakukan perjalanan dan yang melayani atau menyediakan layanan kebutuhan perjalanan wisata. Dengan demikian maka pariwisata juga dapat diartikan perpindahan sementara orang atau sekelompok orang ke tempat-tempat tujuan selain tempat bekerja dan tempat tinggal mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Mason, 1990). Direktorat Jenderal Pariwisata (1992) mengartikan pariwisata adalah semua hal yang berhubungan dengan wisata seperti objek dan daya tarik wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dan bersifat sementara dengan menikmati objek maupun daya tarik wisata.

Menurut Afriza, Sastrayuda, dan Sedarmayanti (2018) pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu kata “pari” dan “wisata”. Yang dimana pari artinya banyal, berkali-kali, berputar-berputar. Sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian. Sedangkan Herman V. Schulalard (ahli ekonomi bangsa Austria, 1910) mengatakan kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan perekonomian yang secara langsung adanya seseorang yang masuk, pendiaman, dan pergerakan orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.

Dalam suatu pembangunan wilayah pembangunan pada sektor pariwisata menjadi hal yang sangat berperan penting. Oleh karena itu tidak sedikit sektor pariwisata menjadi pelaksanaan pembangunan yang selalu diutamakan karena menurut Dara Windiyarti, dkk (1994 : 92-93) pembangunan pada sektor pariwisata akan berdampak pada aktivitas baru pada masyarakat seperti tumbuhnya lapangan kerja dan tumbuhnya perekonomian masyarakat sehingga menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

Pariwisata memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan akan tetapi adanya pihak-pihak lain yang ikut andil dalam pembangunan elemen pendamping. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Larry E. Helber dalam bukunya perencanaan pariwisata dimulai dari pengembangan pariwisata daerah dari segi objek dan atraksi wisata. Setelah itu kita akan dapat melihat bagaimana perkembangannya dari jumlah pengunjung apabila mencapai target yang diinginkan maka selanjutnya dipikirkan system prioritas. Dalam hal pengembangan ini diperlukan pendekatan-pendekatan antara organisasi pariwisata yang ada yaitu pemerintah dan swasta dan pihak-pihak terkait lainnya yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Dalam perencanaan maupun pengembangan kepariwisataan perlu dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lain. Hal ini bertujuan untuk menentukan kebijakan yang mendukung sehingga jenis dan macam pariwisata dapat dikembangkan berdasarkan yang diharapkan. Karena pembangunan pariwisata selalu berhubungan dengan aspek ekonomi maka klasifikasi tentang jenis pariwisata dianggap penting untuk dapat mendapatkan berapa penghasilan devisa yang diterima dari suatu pariwisata yang dikembangkan. Dan juga pemberian klasifikasi berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan atau untuk data penelitian yang diperlukan dalam perencanaan di masa yang akan datang (Afriza, Sastrayuda, dan Sedarmayanti, 2018).

2.3 Pengertian Pariwisata Ikonik

Atraksi wisata ikonik dapat dikatakan sebagai seseorang atau bangunan yang dianggap layak dikagumi dan dihormati, yang juga sering dianggap sebagai simbol representatif terutama budaya (Oxford English Dictionary yang dikutip dalam Holt 2004, hal.1). Dalam atraksi wisata ikonik harus adanya unsur-unsur keaslian produk yang berfungsi sebagai simbol seperti budaya atau warisan yang bertujuan untuk membangkitkan citra positif bagi wisatawan maupun penduduk lokal dan juga bisa diakui secara universal (Grayson dan Martinecc, 2004; Woodside, Cruickshank dan Dehuang 2005; Tang, Morrison, Lohto, Kline, dan Pearce 2009).

Wisata ikon secara cepat dapat dikenali masyarakat karena kepopulerannya. Di dalam atraksi wisata ikonik terdapat struktur yaitu adanya atraksi, proyek, lembaga untuk melambangkan karakter daerah, tujuannya untuk menarik pengunjung dan memberikan kesan yang baik bagi wisatawan (Maitland dan Newman 2004, p.16). Dengan demikian, wisata ikonik menjadi tujuan pertama wisata oleh sebagian orang dan sering memasarkan objek wisata jangka panjang yang melibatkan berbagai intitusi (Becken, 2004). Contohnya seperti wisata Taj Mahal di India, Gunung Fuji di Jepang, Menara Eiffel di Paris, dan Tembok Besar Cina yaitu berfungsi sebagai simbol yang diakui diseluruh dunia dan membangkitkan citra positif yang kuat antara penduduk lokal dan wisatawan (Stemberg 1997, Jenkins 2003). Menurut Weidenfeld (2010) dalam jurnalnya yang berjudul *Iconicity and Flagshipness Tourist Attractions* menjelaskan beberapa kriteria pariwisata ikonik yang akan dijelaskan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria Pariwisata Ikonik

No	Kriteria	Definisi
1	Adanya unsur budaya	Di dalam pariwisata ikonik harus adanya nilai budaya di dalamnya. Nilai budaya tersebut tentunya harus ada hubungannya dengan masyarakat setempat.
2	Pemasaran produk setempat	Di dalam pariwisata ikonik harus adanya pemasaran produk setempat.

No	Kriteria	Definisi
3	Mencirikan karakteristik wilayah	Di dalam pariwisata ikonik harus menunjukkan karakteristik wilayah untuk membuktikan simbol dari suatu wisata.

Sumber : Weidenfeld (2010)

Sedangkan Becken (2004) mendefinisikan wisata ikon adalah suatu tempat wisata yang memiliki aset alami atau buatan yang diterima luas oleh pengunjung sebagai tempat wisata penting dan mendapat pengalaman setelahnya. Pariwisata ikon pada dasarnya menggunakan keunikan sebagai strategi pemasaran. Atraksi pariwisata ikonik memiliki 5 jenjang yang telah mencapai “sacred state” yaitu meliputi adanya identifikasi sumber daya, penekanan pemasaran artinya memaksimalkan kualitas produk, interpretasi, adanya penjualan, dan penggunaan komunitas yang besar.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua penelitian Weidenfeld (2010) dan Becken (2004) bahwa kriteria pariwisata ikonik menurut Weidenfeld (2010) adalah kriteria secara umum dalam pariwisata ikonik yaitu diantaranya adanya pemasaran produk setempat, adanya unsur budaya, dan mencirikan karakter wilayah. Sedangkan berdasarkan Becken (2004) kriteria pariwisata ikonik dipaparkan secara rinci. Pengertian keduanya hampir sama hanya saja Becken (2004) mendefinisikannya lebih rinci dan lebih jelas.

2.4 Teori Partisipasi Masyarakat

2.4.1 Definisi Masyarakat

Menurut Aref et al (2010) masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal atau bekerja di suatu wilayah geografis yang sama dengan beberapa budaya bersama maupun kepentingan bersama. Sebagian besar dari sumber berbagai literature memandang “masyarakat” sebagai unit spasial kecil, struktur sosial homogen dengan norma-norma bersama dan kepentingan bersama (Agrawal dan Gibson 1998; Olsder dan Van der Donk 2006).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana dan sejauh masyarakat lokal ikut serta dalam pembangunan wilayah khususnya pada sektor

pariwisata. Menurut Aref et al 2010; Bushell dan McCool 2007; Janine mal dan Stronza 2009; Tosun 2006 dalam pengembangan pariwisata masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal sebagai sekelompok orang yang memiliki hak akan adat dan sumberdaya dan memiliki hubungan yang kuat dengan budaya, sosial, ekonomi, dan spiritual (Schrel dan Edwards, 2007).

Pengembangan pariwisata dapat menjadi tidak berarti apabila masyarakat lokal tidak merasakan hasil dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Shah et al, 2002). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata tidak dapat diakibatkan karena masyarakat lokal memiliki peran penting dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat (Jamal dan Stronza, 2009).

2.4.2 Definisi Partisipasi Masyarakat

Dalam kamus sosiologi menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan kelompok atau individu dalam suatu kegiatan akan tetapi diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Borny (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” dalam suatu kegiatan pembangunan guna memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Menurut Soetrisno (1995) partisipasi masyarakat adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah atau pemegang kekuasaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi adalah relasi atau hubungan masyarakat dengan pemerintah maupun stakeholders untuk mencapai pembangunan yang diinginkan dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup. Menurut Bintoro (1976) dalam suatu pembangunan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting. Suatu pembangunan yang sedang berjalan tidak akan sempurna apabila tidak ada partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat sangat beragam akan tetapi paling tidak dalam pembangunan lebih baiknya ada partisipasi dalam tahap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Partisipasi adalah adanya proses interaksi antara stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan akan hadir dan mungkin akan

terciptanya ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi, dan memulai suatu aksi bersama akan terjadi (Sumarto dalam Semnodo, 2006:21).

2.4.3 Bentuk-bentuk Partisipasi

Desseldorp (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 5) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Berdasarkan pandangan Davis (1995) dalam Sastropetro (1998) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari :

- 1) Pikiran, merupakan jenis partisipasi level pertama yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
- 2) Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua untuk mendayagukannya secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan
- 3) Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga yang digunakan bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan
- 4) Kehalihan/keterampilan, merupakan jenis partisipasi pada level keempat untuk menentukan suatu kebutuhan
- 5) Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan
- 6) Uang/harta benda, merupakan jenis partisipasi pada level keenam, sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu Slamet (1985) mengidentifikasi mengenai adanya keragaman masyarakat dalam berpartisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Beberapa keragaman berdasarkan input tersebut meliputi :

- 1) Ikut memberikan input dalam artian menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Contohnya keterlibatan masyarakat dalam proyek padat-karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
- 2) Ikut memberikan input dalam artian tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, akan tetapi ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Contohnya sering dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan lingkungannya.
Keduanya hampir mirip akan tetapi pada point nomor 2 warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan tidak memperoleh imbalan atas korban yang diberikan.
- 3) Ikut memberikan input dalam artian menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Contohnya para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang. Meskipun para pekerja tersebut turut berpartisipasi dalam pembuatan hotel akan tetapi mereka tidak akan dapat menikmati hasil pembangunannya karena tidak akan mampu membayar sewa hotelnya.
- 4) Ikut memberikan imbalan dan menerima hasil pembangunan tetapi tidak turut memberikan input.
Partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki di dalam proses pembangunan karena partisipasi dalam bentuk ini biasanya dijumpai pada “pihak ketiga” dalam pelaksanaan pembangunan.
- 5) Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Contoh kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh para penyumbang (donatur) atau sponsor-sponsor kegiatan sosial seperti pendirian panti asuhan, dan lain-lain.

Dari kelima macam keragaman partisipasi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Bentuk partisipasi nomor 2 seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan pada point nomor 1 hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapis-bawah”, sedangkan partisipasi pada nomor 5 seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat

lapisan “bawah”. Selain itu juga point nomor 4 seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam relitanya akan sangat sulit dihindari.

2.4.4 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Mannigel (2008) ada berbagai tingkatan partisipasi mulai dari berbagai informasi sederhana sampai pada tanggungjawab penuh. Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Arnstein (1969) mengemukakan adanya 8 tingkatan berdasarkan kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan dalam pembangunan dan juga Hobley (1996) memaparkan beberapa karakteristik yang terdapat pada tingkatan partisipasi, yaitu akan dijelaskan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Tingkatan Partisipasi

No	Tingkatan Partisipasi	Tingkatan Pembagian Kekuasaan	Karakteristik
1	Manipulasi (Manipulation)	Tidak ada partisipasi	Pengumuman sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang dipertukarkan terbatas
2	Terapi (Therapy)		Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapat masukan dari masyarakat itu sendiri
3	Pemberitahuan (Information)	Masyarakat hanya sebagai alat legitimasi atau justifikasi dalam pembangunan	Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat
4	Konsultasi (Consultation)		Masyarakat didengar akan tetapi tidak selalu dipakai sarannya dan tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
5	Penentraman (Placation)		Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan

No	Tingkatan Partisipasi	Tingkatan Pembagian Kekuasaan	Karakteristik
6	Kemitraan (Partnership)	Masyarakat memegang kendali penuh atas pembangunan	Masyarakat berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah dalam pengambilan keputusan
7	Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)		Masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat rencana, masyarakat diberi kekuasaan sebagai atau bahkan seluruh program
8	Kontrol Masyarakat (Citizen Control)		Masyarakat dapat mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Sumber : Arnstein (1989), Hobbey (1996)

Dari tabel diatas Arnstein mengatakan bahwa tingkat manipulasi dan terapi dianggap itu bukan partisipasi karena pemegang kekuasaan hanya sekedar mendidik dan mengobati. Pada tingkat ketiga yaitu pemberitahuan, konsultasi, dan penetraman dianggap sebagai kategori tokenisme yaitu dimana masyarakat didengar akan pendapatnya akan tetapi masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Apabila partisipasi masyarakat hanya sampai pada tokenisme maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

2.4.5 Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Sementara itu, dalam partisipasi masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yaitu :

1. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat

partisipasi seperti umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, besar pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (2003:9) faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan pariwisata adalah pemilik pariwisata, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Review Jurnal

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume (Tahun)	Nomor	Halaman	Metode	Hasil
1	The Role of Tourist Icons For Sustainable Tourism	Susanne Becken	Journal of Vacation Marketing	2011	1		Menggunakan metode wawancara kepada wisatawan dan pemangku kepentingan	<p>Atraksi wisata ikon merupakan keunikan dari suatu daerah yang menjadi landmark wisatawan karena kepopulerannya. New Zealand memiliki 5 wisata ikon yaitu Milford Sound, Maori culture and geothermal attractions at Rotorua, the Waitomo glow-worm caves, and Mount Cook.</p> <p>Pasar Asia biasanya secara cepat menangkap tempat-tempat terkenal untuk dikunjungi. Akan tetapi keberadaan wisata ikon menimbulkan dampak negatif dari segi konsumsi energi yaitu penggunaan energi rata-rata per wisatawan untuk transportasi sekitar 3.990 MJ, yang setara dengan 116 liter bensin dan emisi 275 kg karbon dioksida. Dari segi sensitivitas ekologis dan sosial di lokasi wisata ikon yaitu Arus wisatawan yang terus meningkat ke Milford Sound menghadapi kemacetan di akses jalan dan fasilitas yang tidak memadai (Toilet dan sistem pembuangan limbah), dan sebagai hasilnya pengunjung mengeluh tentang penggunaan berlebihan dan keramaian (kebisingan pesawat terbang dan 'antrian'). Berdasarkan survey menghasilkan bahwa wisatawan internasional berkemah dan backpacker. Pemangku kepentingan mengatakan bahwa akan mengurangi promosi wisata ikon akan tetapi pihak swasta justru memasarkan situs yang</p>

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume (Tahun)	Nomor	Halaman	Metode	Hasil
								paling terkenal karena swasta memiliki keuntungan yang besar. Penelitian ini menunjukkan keuntungan yang didapatkan dari mempromosikan wisata ikon ke mancanegara, namun perlu dilakukannya pengurangan konsumsi energy, dan pengurangan titik panas dengan dampak lokal yang berpotensi dalam pengembangan daerah.
2	Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta	Any Wahyu Purwandari, Mussadun	Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota	11 (2015)	4	377-390	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif menggunakan kuesioner dengan skala likert, distribusi frekuensi, dan regresi linier berganda serta dekriptif kualitatif dengan purpose sampling dan snowball sampling.	Tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta masuk ke dalam grade 2 artinya masyarakat hanya berperan memberi informasi untuk melakukan konsultasi dan perujukan, tetapi pemegang keputusan ada pada pemerintah. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat kepada pihak pemerintah hanya sebatas bentuk pikiran karena Musrenbangkel merupakan proses perencanaan sehingga dibutuhkan dalam partisipasi masyarakat adalah pikiran. Akan tetapi permasalahannya adalah keterbatasan dalam hal pengetahuan sehingga sulit bagi masyarakat untuk pelaksanaan Musrebangkel.
3	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai di Kecamatan Jerowaru	Hakkiatul Lutpi	Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi	8 (2016)	3		Metode yang digunakan wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan dianalisis dengan	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di tinjau dari 4 indikator yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Ke-empat indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru masih rendah,

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume (Tahun)	Nomor	Halaman	Metode	Hasil
							menggunakan teknik analisis Rating/Peringkat dan teknis analisis indukif.	dibuktikan oleh nilai/skor tingkat partisipasi secara keseluruhan sebesar 0,89.
4	Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Cibedug, Kabupaten Bogor Dalam Pembangunan Jalan Desa Tipe Otta Seal	Ahsan Asjhari	Jurnal Sosek Pekerjaan Umum	5 (2013)	2	76-139	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit untuk diteliti (Faisal 2008).	Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar tahapan pembangunan jalan desa dengan teknologi perkerasan tipe otta seal di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor berada dalam tingkat partisipasi sedang. Tahapan pembangunan jalan desa di Desa Cibedug dengan tipe <i>otta seal</i> tersebut merupakan mekanisme pengembangan untuk dapat diaplikasikan di lokus lain. Guna mencapai partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, maka diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih mengarah kepada kemitraan antara pelaksana kegiatan dengan masyarakat setempat.

Sumber : Hasil analisis 2019